

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKJEN MPR RI, SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI, SEKJEN DPD RI DAN ASRENA POLRI.

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Raker dan RDP Komisi III DPR RI
Hari/tanggal : Senin, 9 Februari 2015
Waktu : Pukul 11.30 s.d. 13.35WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Hadir : 31 orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi III DPR-RI.
Izin : - orang Anggota.
Acara : Penjelasan penyerapan anggaran Tahun 2014 dan usulan APBN-P 2015, untuk MPR RI, Mahkamah Konstitusi, DPD RI dan Polri.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.24 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR.H.M. Aziz Syamsuddin,SH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa dalam rangka fungsi pengawasan Komisi III DPR RI, meminta kepada seluruh mitra kerja yang hadir untuk mengundang Anggota Komisi III DPR RI pada saat terdapat kegiatan atau peresmian gedung/kantor didaerah.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor :S-662/MK.02/2014, tanggal 29 September 2014, perihal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara /Lembaga Tahun 2015, MPR RI memperoleh pagu anggaran sebesar Rp612.036.761.000,-, yang dialokasikan untuk membiayai program-program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU TAHUN 2015
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	37.882.061.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	24.085.000.000
3	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan alat Kelengkapannya	550.069.700.000
TOTAL		612.036.761.000

- MPR mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 537.909.508.257,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sebesar Rp 488.987.454.657,-
 2. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp 22.227.325.000,-
 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp 26.694.728.600,-
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan untuk dilakukannya realokasi/pergeseran anggaran pada TA 2015 antar fungsi/program yaitu dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp 5.548.700.000,00. Realokasi/pergeseran anggaran ini digunakan untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK RI sebesar Rp 4.999.500.000,00 untuk Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persidangan serta Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar Rp. 549.200.000,00 untuk Pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

FUNGSI PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	USULAN REALOKASI (Rp)	PAGU STLH REALOKASI (Rp)
Mahkamah Konstitusi	214.503.011.000	0	214.503.011.000
Fungsi Pelayanan Umum	172.008.048.000	- 549.200.000	171.458.848.000
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mk Ri	156.626.098.000	- 5.548.700.000	151.077.398.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mk Ri	15.381.950.000	+ 4.999.500.000	20.381.450.000
Fungsi Ketertiban Dan Keamanan	42.494.963.000	+ 549.200.000	43.044.163.000
Program Penanganan Perkara Konstitusi	33.497.263.000	0	33.497.263.000
Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	8.997.700.000	+ 549.200.000	9.546.900.000

- Berdasarkan analisis kebutuhan program kerja dan anggaran bahwa alokasi anggaran MK pada TA 2015 yang tersedia sudah memadai, sehingga MK pada Tahun Anggaran 2015 tidak mengajukan usulan tambahan anggaran. Namun demikian, apabila lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) belum ditetapkan, maka penyelesaian PHPU Kada masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perkiraan penanganan perkara PHPU Kada tahun 2015 sebanyak 195 perkara, sehingga Mahkamah Konstitusi membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp11.601.525.000,00.
 - Mahkamah Konstitusi mengharapkan Komisi III DPR RI dapat memberikan persetujuan atas usulan realokasi/ pergeseran anggaran MK TA 2015 antar fungsi/program sebesar Rp 5.548.700.000,00.
4. Berapa hal yang disampaikan oleh Asrena Polri, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat, Polri tahun 2015 akan melaksanakan 13 program yang tersusun dalam dokumen RKA-KL dan DIPA Polri TA 2015 dengan mendasari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 bidang keamanan dengan sasaran, sebagai berikut :

1. Pemenuhan alat peralatan keamanan Polri yang didukung Industri pertahanan
 2. Peningkatan kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan professionalism personil Polri
 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri
- Untuk mendukung terlaksananya sasaran prioritas Polri tahun 2015, telah ditetapkan alokasi anggaran Polri TA 2015 sebesar Rp.51.594 triliun dengan komposisi sebagai berikut :
1. Berdasarkan Jenis Belanja :
 - a. Belanja Pegawai : Rp.31.985 triliun
 - b. Belanja Barang : Rp.13.439 triliun
 - c. Belanja Modal : Rp.6.169 triliun
 2. Berdasarkan Sumber Dana :
 - a. Rupiah murni : Rp.43.825 triliun
 - b. Pinjaman Luar Negeri : Rp.2.332 triliun
 - c. RMP : Rp.356 milyar
 - d. PNBPN : Rp.4.049 triliun
 - e. PDN : Rp.500 milyar
 - f. BLU : Rp.530 milyar
 3. Berdasarkan Program :

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TAHUN 2015
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	25.558.284.770.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.345.094.498.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	368.835.570.000
4	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	14.888.077.000
5	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.085.181.677.000
6	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	360.224.010.000
7	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	624.329.156.000
8	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	112.143.716.000
9	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	770.188.744.000
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.618.017.321.000
11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.917.325.687.000
12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.367.093.963.000
13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27.351.555.000

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TAHUN 2015
TOTAL		47.168.958.744.00 0

- Polri menyampaikan usulan kebutuhan prioritas dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp 11.744.753.200.000,- dengan rencana penggunaan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Anggaran Operasional Kepolisian sebesar Rp.6.744 triliun, meliputi pelaksanaan kegiatan program quick wins, Operasional Babinkamtibmas dan kebutuhan tambahan BBM dalam rangka menghadirkan Polri dalam mengayomi, melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Meningkatkan sarana prasarana Polri sebesar Rp.5 triliun meliputi Pemenuhan kebutuhan pembangunan fasilitas/perumahan asrama /rumah dinas bagi dan pengadaan Alpakam/Almatsus dalam rangka :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan Polri dan bermitra dengan masyarakat serta kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan yang terjadi
 - b. Peningkatan profesionalisme mengantisipasi perkiraan ancaman Kamtibmas yang berkenaan dengan kerawanan potensi konflik
 - c. Penguatan penanganan terorisme, separatis dan kebutuhan penggantian Alpakam/Almatsus
 - d. Terbangun teknologi kepolisian dan sistem informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi
 - e. Meningkatkan pengungkapan penanganan kasus tindak pidana 4 jenis kejahatan (konvensional, kekayaan Negara, trans nasional dan berimplikasi kontinjensi) dan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan personil dalam meningkatkan kesejahteraan.

- Selain usulan tambahan dalam APBN-P 2015, Polri menyampaikan juga usulan kenaikan tunjangan kinerja sebesar Rp 29.685.697.311.000,- , dimana alokasi tunjangan Polri dalam DIPA T.A. 2015 hanya sebesar Rp 7.664.663.010.000,- dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 22.021.034.301.000,-

5. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2015 sebesar Rp763.893.352.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan perincian masing-masing program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2015 (Rp.)
1.	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi	306.970.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	374.573.352.000

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2015 (Rp.)
	Lainnya DPD RI	
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	82.350.000.000
TOTAL PAGU DPD RI		763.893.352.000

- Pagu anggaran DPD RI Tahun 2015 tersebut belum dapat mendukung Rencana Kerja DPD RI Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra DPD RI Tahun 2015 – 2019.
6. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan yaitu, diantaranya sebagai berikut :
- 1) Dalam alokasi anggaran Polri, untuk satu kasus tindak pidana korupsi berapa biaya yang dibutuhkan.
 - 2) Bahwa usulan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Polri harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja Polri dalam melindungi masyarakat.
 - 3) Masih terdapatnya Polres yang membawahi lebih dari satu kabupaten, dalam rangka menindaklanjuti program Polri yang hadir ditengah-tengah masyarakat, bagaimana Polri melaksanakan program tersebut bila satu Polres membawahi beberapa Kabupaten/kota.
 - 4) Meminta perhatian Polri terkait Rumah Sakit Polri di daerah yang kondisinya kurang layak dengan fasliitasnya yang sudah tidak memenuhi standar.
 - 5) Terkait dengan kapal-kapal asing yang masul secara illegal ke perairan Indonesia, diperlukan peningkatan pengamanan di laut. Meminta Polri agar diusahakan kapal-kapal baru untuk mengejar kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
 - 6) Terkait dengan realokasi anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Kontitusi, mengapa dalam pembagian realokasi ini program peningkatan hak konstitusional warga negara hanya sedikit.
 - 7) Terkait dengan anggaran yang disampaikan oleh MPR harus dilihat dengan tugasnya. Sedangkan anggaran yang diusulkan DPD harus dicermati dan dikaji dengan serius mengingat kewenangan yang ada pada DPD.
 - 8) Terkait usulan DPD sebesar Rp.541 milyar dan dengan adanya usulan tentang pembuatan TV streaming, anggaran yang diusulkan tersebut sangat besar dan bukan kebutuhan yang mendesak bagi DPD.
 - 9) Terkait usulan dari DPD tentang pembangunan gedung, mayoritas Anggota Komisi III tidak dapat menyetujui usulan pembangunan gedung tersebut karena pembangunan tersebut bukan kebutuhan yang mendesak dan belum terlihat manfaatnya.
 - 10) Dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini, diusulkan agar mengkaji usulan anggaran MPR sesuai dengan dengan tugas-tugas konstitusional MPR.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Sekjen MPR RI, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen DPD RI dan Asrena Polri tidak mengambil keputusan/kesimpulan. Dan terkait dengan usulan APBN-P Tahun 2014 dari masing-masing mitra kerja Komisi III, akan dibahas dalam Rapat Intern Komisi III dimana fraksi-fraksi yang ada di Komisi III akan menyampaikan pandangannya dalam Rapat Intern yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Februari 2015, pukul.13.00 WIB.

Rapat ditutup tepat pukul 13.35 WIB

KOMISI III DPR RI